

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN
PENGAWASAN SEBAGAI VARIABLE
MODERASI PADA DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

(Studi kasus pada Organisasi Pemerintah Daerah Kab.Lahat)

SKRIPSI



Nama : Ulfah Juliarti

NIM : 222015299

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

Skripsi
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparasi
Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan
Sebagai Variable Moderasi pada Daerah Kabupaten Lahat
(Studi kasus pada Organisasi Pemerintah Daerah Kab.Lahat)

Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Univeritas Muhammadiyah Palembang



Nama : Ulfah Juliarti
NIM : 222015299

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfah Juliarti
NIM : 222015299
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akutansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variable Moderasi pada Daerah Kabupaten Lahat

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang yang telah di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ii serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Palembang. 30 Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Ulfah Juliarti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat
Nama : Ulfah Juliarti
NIM : 22 2015 299
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 2019

Pembimbing I,

Betri.S.E..M.Si..Ak..CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,

Nina SabrinaS..E..M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri.S.E..M.Si..Ak..CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Abstract

Ulfah juliarti / 222015299 / 2019 / *The Effects of Regional Financial Management, Accountability, Transparency on Local Government Performance with supervision as a Variable Moderation Case study in Regional Apparatus Organization of Lahat Regency.*

The purpose of this study was to determine how much the effect of regional financial management on local government performance of Lahat regency, how much the effect of accountability on local government performance of Lahat regency, how much the effect of transparency on local government performance of Lahat regency. The research objective was to determine the effect of regional financial management on local government performance of Lahat regency, to determine how much the effect of accountability on local government performance of Lahat regency, to determine how much the effect of transparency on local government performance of Lahat regency. The variables in this study were regional financial management (X1), accountability variable (X2), transparency variable (X3), supervision (X4), local government performance variable (Y). This type of research was associative. The data used primary data. The population in this study was 25 OPD Lahat Regency. Data collection techniques in this study were using questionnaires and interviews. Data analysis techniques used a data analysis technique that was quantitative using multiple regression tests. The results showed that, in part, regional financial management and accountability had a positive effect on local government performance, and transparency had an effect but not significantly on local government performance. It was recommended that further research be able to expand the object of research, be able to add to the research period and added other variables that could be used to influence local government performance.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Local Government Performance.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi”, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada papaku Drs.H.M.Rusli Mansur.,S.H.,M.Hi dan mamaku Sutismiati.,S.pd serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA

dan Bunda Nina Sabrina, S.E.,M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih

Palembang, Agustus 2019

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang.
karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan
melainkan sebuah kebiasaan”*

by : Ulfah Juliarti

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Allah SWT*
- 2. Papa dan Mama Tercinta*
- 3. Kakak dan Adik Tercinta*
- 4. Keluarga Besar Tersayang*
- 5. Almamaterku Tercinta*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B.. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	12
1. Teori Stewardship.....	12
2. Pengelolaan keungan daerah.....	12
a. pengertian pengelolaan keuangan daerah.....	12
b. pengukuran pengelolaan keuangan daerah.....	13
3. Akuntabilitas.....	17
a.pengertian akuntabilitas.....	17
b. pengukuran akuntabilitas.....	18

4. Transparansi.....	20
a. Pengertian transparans.....	20
b. Pengukuran transparansi	21
5. Kinerja pemerintahan daerah.....	22
a. Pengertian kinerja pemerintahan.....	22
b. Pengukuran kinerja.....	24
6. Pengawasan.....	26
a. Pengertian Pengawasan.....	26
7. Keterkaitan Pengaruh	28
a. Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja.....	28
b. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja	30
c. Pengaruh Transparasi Terhadap Kinerja.....	31
d. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja.....	32
e. Pengawasan Memoderasi pengelolaan keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah	33
f. Pengawasan Memoderasi Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah	34
g. Pengawasan Memoderasi Transparasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah	34
B. . Penelitain Sebelumnya	36
C. . Kerangka Pemikiran.....	38
D. . Hipotesis.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Operasionalisasi Variabel.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Data yang digunakan.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	49
1. Analisis Data.....	49
2. Teknik Analisis.....	51
a. Uji Validitas.....	52
b. Uji Reabilitas.....	54
c. Uji Asumsi Klasik.....	55
d. Uji Hipotesis.....	58
e. Analisis Regresi Linear Berganda MRA.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	65
1. Gambaran Singkat tentang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lahat.....	65
2. Jawaban Responden.....	67
3. Analisis Deskriptif Variable Penelitian.....	71
4. Hasil Pengolahan Data.....	98
a. Uji Validitas	98
b. Uji Reliabilita.....	103
c. Uji Asumsi Klasik.....	104
d. Analisis Regresi Linear Berganda.....	108
e. Uji Hipotesis.....	111
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	134
1. Hasil Pengujian Hipotesis.....	134

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	145
B. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA	147
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	6
Tabel I.2	9
Tabel II.1	36
Tabel II.2	38
Tabel III.1	41
Tabel III.2	42
Tabel III.3	46
Tabel IV.1	65
Tabel IV.2	67
Tabel IV.3	69
Tabel IV.4	72
Tabel IV.5	73
Tabel IV.6	74
Tabel IV.7	75
Tabel IV.8	76
Tabel IV.9	77
Tabel IV.10	78
Tabel IV.11	80
Tabel IV.12	81
Tabel IV.13	83
Tabel IV.14	84
Tabel IV.15	86
Tabel IV.16	87
Tabel IV.17	88
Tabel IV.18	89
Tabel IV.19	91
Tabel IV.20	93
Tabel IV.21	94
Tabel IV.22	95
Tabel IV.23	96
Tabel IV.24	97
Tabel IV.25	99
Tabel IV.26	100
Tabel IV.27	101
Tabel IV.28	101

Tabel IV.29	102
Tabel IV.30	103
Tabel IV.31	105
Tabel IV.32	106
Tabel IV.33	107
Tabel IV.34	109
Tabel IV.35	111
Tabel IV.36	112
Tabel IV.37	114
Tabel IV.38	115
Tabel IV.39	118
Tabel IV.40	118
Tabel IV.41	120
Tabel IV.42	121
Tabel IV.43	122
Tabel IV.44	123
Tabel IV.45	125
Tabel IV.46	128
Tabel IV.47	128
Tabel IV.48	130
Tabel IV.49	131
Tabel IV.50	132
Tabel IV.51	133

DAFTAR GAMBAR

Tabel II.2.....	38
Tabel IV.31	105
Tabel IV.33	107

ABSTRAK

Ulfah juliarti/222015299/2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat, seberapa besar pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat, seberapa besar pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Lahat, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah (X_1), Variabel akuntabilitas (X_2), Variabel transparansi (X_3), Pengawasan (X_4), Variabel kinerja pemerintah daerah (Y). Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 OPD Kabupaten Lahat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yaitu kuantitatif menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dan transparansi memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Disarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, dapat menambah periode penelitian serta menambahkan variabel lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Ulfah Juliarti / 222015299/2019. The Influence of Regional Financial Management, Accountability, Transparency on the Performance of Local Governments with Supervision as a Moderating Variable Case Study in Lahat District Regional Organizations.

The purpose of this study was to learn more about regional financial management on the performance of the Lahat district government, a large evaluation between accountability for the performance of the Lahat district government, comparing the size of the support for the performance of the Lahat district government. With the aim of the research is to find out how to manage regional finances against the Lahat local government, to obtain knowledge about the performance of the Lahat district government, to gain an understanding of the government's performance improvements to the Lahat regional government. The variables in this study are regional financial management (X1), accountability variables (X2), approval variables (X3), supervision (X4), performance variables of local government (Y). This type of research is associative. The data used is primary data. The population in this study was 25 OPDs in Lahat Regency. The technique of collecting data in this study uses questionnaires and interviews. The data analysis technique uses data analysis techniques, namely quantitative using multiple regression tests. The results showed that, in part, regional financial management and accountability had a positive influence on the performance of local governments, and accountability had insignificant significance to the performance of local governments. Further on further research in order to improve research, can add to the period of research and add other variables that can be used to improve the performance of local governments.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Local Government Performance

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan(<http://www.bpk.go.id>).

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang dipenuhi pemerintah adalah dilaksanakannya *Good Governance*. Otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan signifikan dan fundamental pada negara Indonesia. Ini disambut dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya pandangan pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik (*Good Governance*). Konsekuensi bagi daerah yakni dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pengalokasian dana yang sebaik-baiknya, maka implikasinya pada pertumbuhan daerah yang dapat berjalan sesuai harapan, maka diperlukannya juga pengawasan yang baik.

Pengawasan Keuangan Daerah ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Secara garis besar peraturan ini menyebutkan bahwa proses pengendalian internal meliputi proses audit, re-view, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi juga kinerja yang baik.

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintahan daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Di karenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintahan secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Perkembangan organisasi sektor public yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah telah menimbulkan dampak yaitu korupsi yang begitu marak dan semakin kuat di daerah(Hendra,2017: 2).

Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban, difokuskan umumnya pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada menghemat anggaran, sehingga terjadi penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, bahkan melenceng dari target atau tujuan kinerja pemerintah (Loi, 2015). Pengukuran kinerja adalah proses yang berurutan guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor public, sebagai alat pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan, mewujudkan tanggung jawab publik (Wiratna,2015: 107).

Pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* yaitu untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan hasil yang optimal serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dalam pencapaian tujuan organisasi selain *value for money* ada juga akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakan yang ditunjukkan kepada yang memberi wewenang.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Mardisimono,2010)

Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintahan, 2015 Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya seta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Dengan demikian dari berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pemenuhan hak-hak politik public yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada masyarakat secara periodic. Akuntabilitas public adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD, masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Akuntansi mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diteimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu : 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dilacak otoritas legalnya,

2) aspek pengelolaan (*sterwarship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asser fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Laporan keuangan pemerintahan harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomu, social dan polotik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihal yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accouptable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahu kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumbr daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2016: 17). Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintahan, (2015) Transparasi adalah memberikan

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tabel I.1
Opini BPK Atas Lkpd Tahun 2012-2018 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No	Entitas	Opini						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : www.bpk.go.id 2019

Pemerintahan dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemeriksaan Laporan Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Lahat sudah baik. Namun disayangkan masih banyaknya penemuan berupa penyelewengan dana yang dilakukan.

Fenomena yang terjadi saat ini, Pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik tapi malah memburuk kita juga mendapatkan informasi tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapai 20-40% semestinya dana itu bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan untuk program pembangunan seperti infrastruktur namun dikarenakan terjadinya kebocoran dana itu terasa kurang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (SrimAdiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, <https://m.kaadata.co.id>)

Fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Lahat yaitu kasus korupsi dana rutin Badan Penganggulan Bencana Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran Rp.715.500.000, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 473.000.000 yang dilakukan oleh dua pihak Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), pada dana rutin secara bersama sama dan sudah ditahan karena berkas dan barang bukti sudah dinyatakan lengkap. (Rifqi Ari Alfa, S.H., MH, Kasi Kabupaten Lahat).

Fenomena lainnya yaitu kasus dugaan korupsi oleh Sekretariat DPRD Lahat tahun anggaran 2014 senilai Rp 5.765.970.998, dimana dana tersebut mengalir saat kegiatan di DPRD Kabupaten Lahat sudah tidak ada lagi atau tutup buku, namun sekertaris memaksa dana tersebut agar secepatnya di transfer ke rekening Sekretariat DPRD Lahat dengan 4 kali transfer (Dodo Arman, DPD NCW Lahat). Selain itu juga fenomena sejenis ini terdapat adanya kasus korupsi Sistem Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun

2010, dengan perkiraan kerugian negara mencapai RP. 204.071.400, yang menjerat tiga tersangka berinisial AZ, PW, dan HS. HS inisial tersangka yang dulu berposisi sebagai pihak penyediaan barang di proyek itu sekaligus merupakan kontraktor kegiatan tersebut kini telah ditahan. (Helmi, Kajari Lahat).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Nopriansyah (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian pengelolaan keuangan daerah dan Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negative tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Demikian pula dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Diana dkk (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kota Kotaamobagu, dan Penwasan Internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kota Kotamobagu.

Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shinta dkk (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sedangkan Transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan.

Tabel I.2
Survei pendahuluan

Nama Perangkat Daerah	Fenomena Yang ditemukan
Dinas Badan Keuangan Daerah	<p>Kinerja Dinas Badan Keuangan Daerah Kab.Lahat belumlah dikatakan baik,karena sering ditemukan adanya rangkap jabatan yang dilakukan pihak pihak di Dinas Badan Keuangan Daerah.Rangkap jabatan sering terjadi karena banyaknya faktor kepentingan,yang biasanya sering dimanfaatkan oleh pejabat dengan memberikan kepada pihak keluarga,dan ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan.</p> <p>Rangkap jabatan juga berpotensi atau berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret berbagai politisi terlibat kasus korupsi,dengan demikian kinerja dinas tersebut masih diperlukan perbaikan.</p>
Inspektorat	<p>Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun sangat disayangkan pengwasan khususnya di Kab.Lahat masih sangat lemah dan terkesan ada pembiaran sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apabila inspektorat sebagai pelaksanaan pengawasan tidak dapat menjalankan pengawasan secara efektif maka penyelewengan akan terjadi, baik dari segi anggaran maupun lainnya.Kurang efektifnya pengawasan menyebabkan kinerja di inspektorat Kab.Lahat dikatakan kurang baik.</p>
RSUD	<p>Pada Dinas RSUD lahat kinerja , pengelolaan keuangan , transparansi belumlah berjalan dengan baik. Sangat disayangkan sekali dikarenakan masih ada banyak kasus penyalah gunaan wewenang dan juga dana-dana lainnya yang dilakukan oleh pihak tak bertanggungjawab. Penyelewengan yang dilakukan menyebabkan kerugian pada pemerintah, RSUD kab lahat dan masyarakat setepat itu sendiri.</p> <p>Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja RSUD Kab.Lahat dikatakan belum baik, dan masih banyak perlu dibenahi</p>

Sumber: penulis, 2019

Berdasarkan pada survey pendahuluan table I.2 yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara terhadap beberapa Organisasi Pemerintahan

Daerah pada beberapa OPD yang ada di Kota Kabupaten Lahat dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa OPD belum menerapkan karakteristik dengan baik dalam kinerjanya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat bagi penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Lahat.

2. Manfaat bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat

Bagi pemerintahan daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good government*).

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. dan Iqbal M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Anne. (2018). Buruknya pengelolaan keuangan daerah dan rencana anne maju di pilkada purwakarta, melalui ([www. Kompasiana..com](http://www.kompasiana.com)) diakses 08 Februari 2018
- Ani,S. 2018. *Pengantar pemerintahan daerah kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Arifin, T. 2015. *Kebijakan publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. ALFABETA : Bandung
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Bambang, S. Dadang, S. dan Agung, M. 2017. *Kebijakan akuntansi akrual pemerintah daerah*. Ghalia Indonesia : Bogor
- Deddi, N. dan Ayuningtyas,H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* . Salemba Empat : Jakarta.
- Diana Nova Lingtong, David Paul Elia Saerang, dan Venjte Ilat. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Vol 06. No 01.
- Dwi Ralmono, dan Sholihin, M. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Vol 8. NO 1.
- Fernandes, Wanda. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinera pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Vol. 2 No. 2.
- Hari Setiyono. (2018). Eks direktur RSUD OKU Timur jadi tersangka korupsi gaji dokter fiktif. Melalui ([www. Merdeka.com](http://www.merdeka.com)) diakses jum'at 23 maret 2018.

<http://www.bpk.go.id/news/bpk-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>.

<http://lahatkab.go.id/statis-188-satuanperangkatkerjadaerahkab.lahat.html>

Hasibuan, H. Malayu SP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara Jakarta.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.

Indra Bastian. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisa Multivariate IBM SPSS 21*. UNDIP PRESS. Semarang.

Jones, R. dan Pendlebury. 2010. *Public Sector Accounting*. Pearson Education Limited

Kariangan, Hendra. 2017. *Carur-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perspektif hukum dan publik*. Kencana

Kerangka Konseptual, Standar Akuntabilitas Pemerintah. 2015

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.

Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI : Yogyakarta.

Muindro Renyowijoyo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba*. Mitra Wacana Media :

Ni Luh Putu Uttari Premananda, Made Yenni Latrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar. Vol.18 No.3

Nunik handayani. (2017). Temuan atas penyimpangan pengelolaan APBD yang berpotensi merugikan keuangan daerah di kab. Musi Banyuasin. Melalui (<https://info-anggaran.com>) diakses 05 Mei 2017

Nopriansyah Putra, Erlina, dan Tapi Anda Sari. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating
Pada Provinsi Sumatera Utara. Vol 19. No 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2014

Sekaran, Uma. (2017). *Research Methods for business*. Edisi dan 2. Salemba Empat : Jakarta

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT ALFABETA :Bandung

Sri Adiningsih. Pengelolaan keuangan daerah masih buruk. Melalui (www.Sindonews.com) diakses Senin 03 April 2017